

INTERPRETASI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP MERGER BANK SYARIAH BUMN

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan interpretasi hukum atas Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap merger bank syariah BUMN yang mengecualikan badan usaha tertentu untuk melakukan monopoli dalam sektor badan usaha tertentu berdasarkan pendekatan *rule of reason*. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan tindakan merger 3 BUMN menjadi satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam sektor perbankan syariah yang melebihi batas untuk melakukan merger. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa interpretasi secara restriktif atas Pasal 51 UU 5/1999 terhadap merger bank syariah BUMN melebihi batas yang diberikan oleh peraturan perundangan lainnya yaitu Pasal 28-29 UU 5/1999 *jo.* PP 57/2010, tetapi dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 UU 5/1999. Adapun penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan ditarik berdasarkan asas kepastian hukum dan teori penafsiran hukum, bahwa Pasal 51 UU 5/1999 memberikan pengecualian terhadap tindakan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli atas badan usaha tertentu berdasarkan pendekatan *rule of reason*.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Persaingan Usaha, Penggabungan

Abstract

This study was conducted to describe the legal interpretation of Article 51 of Law Number 5 of 1999 on the merger of state-owned Islamic banks which exclusivity of certain business enterprises to conduct monopoly practices in certain business sectors based on the rule of reason approach. This writing is motivated by the act of mergers of 3 SOEs into one state-owned enterprise engaged in the Islamic banking sector which exceeds the threshold for conducting a merger. The results of the study reveal that the restrictive interpretation of Article 51 of Law 5/1999 on the merger of SOE Islamic banks exceeds the limit provided by other laws and regulations, which is stated in Articles 28-29 of Law 5/1999 juncto. PP 57/2010, but is excluded as stated in Article 51 of Law 5/1999. This research was carried out in a normative juridical manner, with a legal approach and a conceptual approach. The conclusion is drawn based on the principle of legal certainty and the theory of legal interpretation, with the result that Article 51 of Law 5/1999 provides exceptions to actions that cause unfair competition and monopoly over certain business entities based on a rule of reason approach.

Keyword : Legal Interpretation, Competition, Merger